

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, P., Glaeser, E., Venables, T., Manwaring, P., & Blake, M. (2018). Land and Property Taxes for Municipal Finance. IGC Cities That Work Policy Paper, Version 2.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Hafsah., & Loka, R, F. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *LIABILITIES (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24-37.
- Haldenwang, C., Elfert, A., Engelmann, T., Germain, S., Sahler, G., & Ferreira, A. S. (2015). *The Devolution of the Land and Building Tax in Indonesia. The German Institute of Development and Sustainability (IDOS)*, 89(89).
- Harefa, M. (2016). Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 oleh Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 7(1), 67–82.
- Hatta, F., & Amalia, D. (2018). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal REKSA Rekayasa Keuangan Syariah Dan Audit*, 4(2), 130-147.
- Hebimisa, M. T., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 1021–1032.
- Indriani, H., Wahasusmiah, R., & Noviardy, A. (2017). Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*. Lampung: Institut Informatika dan Bisnis.
- Kalkuhl, M., Milan, B. F., Schwerhoff, G., Jakob, M., Hahnen, M., & Creutzig, F. (2017). *Fiscal Instruments for Sustainable Development: The case of Land Taxes*.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2016), Depdikbud, Yogyakarta: Balai Pustaka
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah: Penggalan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Keputusan Wali Kota Madiun Nomor 973-401.203/253/023 tentang Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2024.
- Kumoro, M. P., & Ariesanti, A. (2017). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya terhadap Kemandirian Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Yogyakarta*, 2(1), 75–90.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Litera.
- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi pada Dinas

- Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik*, 5(2), 89–104.
- Norregaard, J. (2013). Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges. *IMF Working Papers*, 13(129).
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Safaruddin., A, Muntu., & Oktaviani, S. (2020). Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 190-204.
- Setiawan, B., Rachmad, M., & Delis, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) serta pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. In *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 15(2), 183-196.
- Simba, N., Baga, L., & Rachmina, D. (2022). Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 13(1), 57–63.
- Sinaga, N, A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Nusantara*, 7(1).
- Sulistiyanti, H. S. E. (2022). Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan di Kota Madiun (Skripsi tidak dipublikasi). Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Windiarti, W., & Sofyan, M. (2018). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Depok. *Jurnal Ilmiah Ekbank*, 1(2), 29-39.
- Worumi, H. (2019). Model Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarmi Provinsi Papua. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 6(3), 23–39.
- Yunarti, D, A., Wilopo., & Mayowan, Y. (2016). Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi Kasus di Kabupaten Malang Ditinjau Dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak Yang Berlaku). *JEJAK : Jurnal Perpajakan*, 8(1).